



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG : PENDIDIKAN; OLAH RAGA; SAINS DAN TEKNOLOGI)**

|                  |   |
|------------------|---|
| Tahun Sidang     | : 2025—2026   |
| Masa Persidangan | : V   |
| Rapat ke-        | : 39  |
| Jenis Rapat      | : Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Komisi X DPR RI dengan Akademisi dan Pengamat Pendidikan: Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D., Prof. Ganefri, Ph.D., dan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.                                 |
| Sifat Rapat      | : Terbuka   |
| Hari/Tanggal     | : Rabu, 24 Juni 2026  |
| Waktu            | : Pukul 10.00 WIB s.d Selesai   |
| Tempat           | : Ruang Rapat Komisi X DPR RI Gd. Nusantara I Lt. 1<br>Jl. Jend. Gatot Subroto Senayan, Jakarta.  |
| Acara            | : 1. Kebijakan dan Implementasi Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) PTN 2026.<br>2. Evaluasi SPMB Tahun 2024-2025.<br>3. Usulan rekomendasi untuk pelaksanaan SPMB 2027.<br>4. Lain-lain (masukan untuk revisi RUU tentang Sisdiknas). |
| Ketua Rapat      | : Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si (Ketua Rapat/Wakil Ketua Komisi X DPR RI)  |
| Sekretaris Rapat | : Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si./Kabagset. Komisi X DPR RI.   |
| Hadir            | : 16 (enam belas) Anggota dari 22 (dua puluh dua) Anggota, dan 8 Fraksi dari 8 (delapan) Fraksi;<br>A. Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D/;<br>B. Prof. Ganefri, Ph.D.;<br>C. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.   |

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.25 WIB oleh Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si (Wakil Ketua Komisi X DPR RI) Setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. CATATAN/KESIMPULAN

1. Panja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Komisi X DPR RI mengapresiasi pemaparan dan penjelasan Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D., Prof. Ganefri, PhD., dan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., yang telah menyampaikan masukan tentang penyelenggaraan SPMB (bahan paparan terlampir).

### A. Pandangan Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D.

#### a. Akses dan Daya Tampung

- 1) APK pendidikan tinggi Indonesia (~32-33%) masih jauh tertinggal dibanding Malaysia (38%) dan Singapura (78%).
- 2) Daya tampung PTN 2025 mencapai 627.957 kursi (146 PTN), tumbuh rerata 10%/tahun, dengan tingkat daftar ulang 90%.
- 3) Dari 3,7 juta lulusan SMA/ sederajat per tahun, hanya 15-16% yang tertampung di PTN, ruang ekspansi sebenarnya masih sangat besar, tapi terhambat oleh kurangnya daya tarik dan keterjangkauan PTS berkualitas.

#### b. Pelaksanaan SPMB 3 Tahun Terakhir

- 1) Terjadi ketimpangan struktural: porsi mahasiswa baru PTN naik dari 34,4% menjadi 47,3% (2014-2025), sementara porsi PTS justru turun dari 65,6% menjadi 52,7%.
- 2) Beberapa PTN (Unesa, IPB) mengalami ekspansi kuota sangat agresif (>100% dalam setahun), sementara PTN-BH besar (UI, UGM, ITB, Unair) relatif terkendali.

#### c. Kendala dan Integritas Seleksi

- 1) PTS kekurangan calon mahasiswa (30% PTS isi <50% kuota, beberapa tutup); PTN rasio dosen-mahasiswa memburuk akibat ekspansi cepat.
- 2) Kecurangan terorganisir jadi sorotan: 38 kasus kecurangan berat UTBK 2026 (termasuk 27 joki), 2.940 anomali terdeteksi, >90% kasus joki menysar prodi kedokteran. Modus makin canggih (foto AI, remote desktop, alat bantu dengar).
- 3) Jalur mandiri dinilai paling rawan 252.000 kursi dengan pengawasan lebih lemah dari jalur nasional.
- 4) Upaya mitigasi sudah berjalan: face recognition, pengacakan lokasi/sesi, blacklist permanen tapi payung hukum khusus SPMB masih lemah.

#### d. Akar Kesenjangan 3 (tiga) faktor di luar SPMB itu sendiri yang membatasi akses: mutu sekolah menengah tidak merata, norma sosial-ekonomi (pernikahan dini, kemiskinan), dan kesenjangan akses informasi memperbaiki SPMB saja tidak cukup tanpa adanya pembenahan pendidikan menengah.

#### e. Universitas Terbuka (UT) mengalami ekspansi mahasiswa sangat tajam (412.697 di 2022 menjadi 768.248 di 2025, naik 46% dalam 2 tahun) bergeser dari mandat sosial awal (Keppres Nomor 41 Tahun 1984) menjadi instrumen

akselerasi APK nasional, yang berkompetisi langsung dengan PTS tanpa dialog terbuka dengan pemangku kepentingan PTS.

f. Rekomendasi untuk Panja SPMB Komisi X DPR RI diantaranya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan mutu & daya saing PTS;
- 2) Melakukan peninjauan ulang peran dan mandat Universitas Terbuka;
- 3) Pembiayaan PT yang berkeadilan (KIP-K, voucher, kredit tanpa bunga);
- 4) Perbaikan mutu pendidikan menengah;
- 5) Audit independen kuota jalur mandiri dan sanksi tegas;
- 6) Sinkronisasi kalender SPMB (satu gelombang, tanpa perpanjangan otomatis);
- 7) Perluasan sistem anti-kecurangan (face recognition, deteksi AI) ke semua jalur;
- 8) Tutup celah regulasi lewat definisi tertutup (numerus clausus) jalur masuk PTN;
- 9) Regulasi sudah ada namun lemahnya penegakan dan transparansi PTN dan PTS harus dilihat sebagai mitra dalam satu ekosistem, dan ekspansi daya tampung PTN harus dibarengi penjagaan mutu serta keadilan bagi PTS, sembari pendidikan menengah diperbaiki secara simultan.

## **B. Pandangan Prof. Ganefri, PhD**

a. Data Pendaftar & Pertumbuhan

- 1) SNBP 2024: 900.018 siswa eligible, 702.312 finalisasi (naik dari 612.049 di 2022), melibatkan 145 PTN. Mayoritas dari SMA (449.340), diikuti SMK dan MA
- 2) SNBT 2024: Lonjakan drastis peserta dari 17.784 peserta hadir UTBK (2022) menjadi 632.101 peserta hadir (2024), didominasi lulusan tahun berjalan (1,4 juta registrasi akun).
- 3) Peserta KIP Kuliah yang lulus cukup signifikan di semua jalur (20-28%).
- 4) 905 pendaftar difabel (75 tunanetra, 830 tunadaksa), tingkat kelulusan 20,89%.

b. Masalah Keterpenuhan Daya Tampung

Realisasi daftar ulang belum sesuai harapan beberapa PTN Vokasi maupun Akademik masih di bawah 50% keterpenuhan, terutama di jalur Mandiri dan Politeknik.

c. Lebih dari 30.000 siswa terkendala validitas data NISN/Pusdatin (khususnya lulusan MA dan tahun-tahun sebelumnya), sampai tidak bisa membuat akun SNPMB.

d. Beberapa PTN hanya ikut SNBP tanpa SNBT

Jalur SNBP:

- 1) Ketidaksesuaian nilai PDSS vs rapor asli 30% PTN memaklumi dan tetap meloloskan.
- 2) Banyak sertifikat prestasi diragukan keasliannya/lembaga penerbitnya.
- 3) Perbedaan metode seleksi untuk lulusan Kurikulum Merdeka vs Kurikulum 2013 di beberapa PTN.

Jalur SNBT:

- 1) Celah pemanfaatan batas usia peserta Paket C.
- 2) Masih ada mitra sekolah pelaksana UTBK yang terindikasi kecurangan.
- 3) Lokasi UTBK di daerah terluar jumlah pesertanya jauh di bawah harapan, walau respons masyarakat positif.
- 4) Kriteria khusus PTN dalam SNBT dipertanyakan legalitasnya (seharusnya hanya berlaku di jalur Mandiri sesuai Permendikbudristek No. 62/2023).

Jalur Mandiri:

- 1) Beberapa PTN mengumumkan hasil Mandiri sebelum data daftar ulang SNBT selesai diverifikasi.
  - 2) Modus pendaftaran ganda dengan NISN berbeda untuk menghindari deteksi.
  - 3) Beberapa PTN membuka pendaftaran Mandiri melewati tenggat 31 Juli 2024 meski daya tampung sudah terisi >50%.
- e. Evaluasi teknis operasional dari pelaksana SNPMB bahwa meski jumlah peserta tumbuh pesat, terdapat kelemahan tata kelola data, validasi dokumen, kepatuhan tenggat waktu, dan konsistensi penerapan regulasi antar-PTN terutama di jalur SNBP (soal keabsahan nilai/sertifikat) dan jalur Mandiri (soal kepatuhan jadwal dan integritas data pendaftar).

### **C. Pandangan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.,**

- a. Permasalahan dan kendala dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) PTN dihadapkan pada paradoks *equality vs equity* seleksi yang netral/seragam justru bisa memperkuat ketimpangan karena titik awal peserta berbeda kesenjangan urban-rural, mutu SLTA bervariasi, ekonomi keluarga, akses bimbingan belajar, Daya tampung PTN tidak sebanding dengan jumlah

peminat, Integrasi data pendidikan menengah-tinggi belum optimal (rawan manipulasi).

b. Evaluasi Jalur Seleksi (SNBP, SNBT, Mandiri)

- 1) Ketiga jalur punya kelebihan dan kelemahan masing-masing, namun secara umum sistem dinilai kredibel, valid (tidak ada kebocoran soal UTBK/SNBT), dan transparan.
- 2) Konsentrasi pendaftar pada PTN besar dan prodi tertentu.
- 3) Ketimpangan kapasitas PTN antar wilayah.
- 4) Minimnya keterkaitan pilihan prodi dengan kebutuhan SDM/lapangan kerja.
- 5) Perlunya sinergi data PTN, PTKL, dan PTS.

c. Rekomendasi SPMB 2027

- 1) Stabilitas kebijakan minimal 3 tahun (2027-2029), bukan sekadar ganti nomenklatur.
- 2) Sistem seleksi multidimensi: akademik, karakter, kreativitas, kepemimpinan, portofolio.
- 3) Afirmasi berbasis indeks kerentanan wilayah dan sosial-ekonomi.
- 4) Dashboard nasional & audit independen untuk transparansi.
- 5) Sinergi PTN, PTKL, dan PTS Unggul sebagai mitra (bukan pesaing) untuk perluasan akses.
- 6) Penguatan peran Universitas Terbuka/Digital khusus untuk pembelajar sepanjang hayat (bukan fresh graduate).
- 7) Negara perlu memastikan setiap anak Indonesia mendapat kesempatan adil untuk berkembang lewat pendidikan tinggi bermutu, menjadikan SPMB sebagai instrumen mobilitas sosial dan transformasi pendidikan jangka panjang menuju 2045.

2. Terhadap paparan dan masukan yang disampaikan oleh narasumber, Panja SPMB Komisi X DPR RI berpandangan:

- a. Meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi Swasta (PTS) agar mampu menjadi pilihan pendidikan yang kompetitif, sehingga tidak seluruh calon mahasiswa hanya berfokus pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN), memperluas akses masyarakat ke pendidikan tinggi, meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) serta mendorong terciptanya ekosistem pendidikan tinggi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
- b. Perguruan tinggi harus menghasilkan lulusan yang mampu menjawab kebutuhan ekonomi masa depan, perkembangan teknologi, dan perubahan aspirasi generasi muda
- c. Perlu dilakukan penataan sistem penerimaan mahasiswa baru nasional yang lebih transparan, adil, dan efisien, penguatan mekanisme seleksi berbasis prestasi dan tes yang objektif, serta pengaturan mobilitas peserta agar dapat

meminimalkan kursi kosong dan menciptakan ruang yang lebih proporsional bagi PTS.

- d. Pemerintah perlu memperkuat pemerataan akses pendidikan tinggi melalui optimalisasi perguruan tinggi swasta, serta menajamkan kebijakan KIP Kuliah dan sistem seleksi mahasiswa dengan mengintegrasikan aspek akademik dan sosial ekonomi untuk meningkatkan ketepatan sasaran, keadilan, dan relevansi dengan kebutuhan dunia kerja.
  - e. Perlu dilakukan riset dan evaluasi berkala terhadap hubungan antara metode seleksi mahasiswa baru dan capaian prestasi mahasiswa selama masa studi, sehingga dapat diketahui efektivitas, validitas, dan relevansi mekanisme seleksi yang saat ini digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan penerimaan mahasiswa baru di masa mendatang.
  - f. Perlu disusun standardisasi kebijakan dan mekanisme integrasi KIP Kuliah pada seluruh jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), baik melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), guna menjamin kesetaraan akses, kejelasan prosedur, dan kepastian layanan bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu di seluruh perguruan tinggi.
  - g. Perlu disusun kebijakan afirmasi yang memberikan alokasi daya tampung bagi calon mahasiswa yang berasal dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dan daerah marginal serta keluarga kurang mampu, guna memperluas akses dan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi bagi kelompok yang menghadapi keterbatasan dan kesulitan bersaing dalam mekanisme seleksi yang berlaku saat ini.
3. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDP hari ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panja SPMB Komisi X DPR RI.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 13.25 WIB

**Ketua Rapat,**

**ttd.**

**Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si.**